

STUDI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN LOA JANAN ILIR, KOTA SAMARINDA

Hudthaibah¹ Bambang Irawan², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Dalam Bidang Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan indikator: Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, Perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan Koordinasi, Perencanaan dan Pelaporan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, dimana untuk data primer, pada penelitian ini digunakan teknik pemilihan informan dengan metode purposive sampling yang merupakan salah satu teknik dalam non-probability sampling. Teknik ini digunakan karena para individu yang menjadi informen merupakan orang yang berkompeten untuk memberi informasi yang ingin diketahui sesuai dengan tujuan penelitian. Yang dimana menjadi Key informen dalam penelitian ini adalah Lurah Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, sedangkan yang menjadi informen adalah Sekretaris Lurah, Kasi Kesejahteraan dan 1 orang Staf.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat tentang pendataan dan penyiapan data sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, setiap perumusan kebijakan yang dilaksanakan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik. Perumusan kebijakan berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, arahan dan aspirasi masyarakat, koordinasi, komunikasi, perencanaan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

pelaporan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik sehingga semua kegiatan terlaksana, Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan adalah kerjasama yang dilakukan oleh semua jajaran yang ada di Pemerintah Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir dan masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah anggaran yang terbatas, SDM yang kurang baik kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan.

Kata Kunci : Tugas Pokok dan Fungsi, Kesejahteraan dan Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi biasanya dilakukan melalui program pengembangan masyarakat. Menurut laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017) pengembangan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai “upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai”.

Berdasarkan pemahaman dari Kementerian Sosial tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui dukungan pemerintah daerah untuk keberlanjutan capaian pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) Kepala daerah mempunyai tugas huruf (a.) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dengan demikian, jelas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tidak halnya Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun Visi, Misi sesuai dengan agenda prioritas nasional. Sehingga dalam perwujudan program pengembangan masyarakat di Kota Samarinda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertinggi, atau dalam hal ini Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya pelaksanaan pengembangan masyarakat yang efektif dan efisien Pemerintah Kota Samarinda dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada bagian konsideran huruf a. disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah melalui peran kelurahan yang dipimpin seorang Lurah dengan tanggung jawab.

Kemudian sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan, Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan konsideran atau pertimbangan diantaranya yakni: Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan wilayah perlu dibantu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan; dan bahwa untuk meningkatkan kinerja Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya perlu dibantu oleh perangkat Kelurahan.

Selain peraturan daerah diatas, berkenaan dengan organisasi kelurahan terdapat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Pasal 25 (1) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana dimuat penjabaran tugas-tugas kepala seksi termasuk Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu kelurahan yang menjadi gerbang Kota Samarinda dari atau ke arah Kota Balikpapan dan merupakan kelurahan yang memiliki akses jalan dan sungai ke Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kelurahan Simpang Tiga yang berada di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir.

Kelurahan Simpang Tiga merupakan kelurahan tertua dan terpadat populasi di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir berdasarkan data penduduk per Km² dengan 3.256 per Km² dengan jumlah penduduk keseluruhan 13.708 jiwa dari luas wilayah 4,21 Km² (BPS Kota Samarinda, 2016).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti kepada pihak masyarakat dan pihak Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda diperoleh informasi bahwa terdapat program pengembangan masyarakat melalui program pelatihan usaha dan pemberian rombongan atau sarana lapak kepada sejumlah pedagang kecil di tahun 2017 yang bersumber dari bantuan pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disalurkan melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Simpang Tiga. Namun dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada pedagang terdapat permasalahan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan, yakni:

1. Data yang diberikan oleh RT masih belum akurat dalam menentukan masyarakat yang perlu menerima setiap program bantuan yang akan disalurkan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Hanya masyarakat yang memiliki akses dan kedekatan kekerabatan yang diprioritas sejumlah Ketua RT untuk mendapatkan atau menjadi penerima program pengembangan masyarakat.
3. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dalam rangka menghimpun dan memfasilitasi partisipasi aktif dan inisiatif atau pemberdayaan masyarakat.
4. Masih banyaknya masyarakat yang bergantung terhadap program-program bantuan yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan keempat permasalahan hasil survei awal tersebut, sesungguhnya terdapat kecenderungan ketidaktegasan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam memberikan arahan dan penugasan kepada para Ketua RT di wilayah Kelurahan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul “Studi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda”.

Rumusan masalah

Dengan mengacu pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda ?

TEORI DAN KONSEP

Pengertian Organisasi

Menurut Melayu S. P. Hasibuan, (2001:24) “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Kemudian Mooney (2001:25) “Organisasi adalah setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Selanjutnya menurut Atmosudiro (2001:26) “Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”.

Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1552) “Tugas diartikan sebagai (1) “yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yg menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yg dibebankan; (2) suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan kata pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online diartikan sebagai “asas;

dasar; inti sari”. Untuk kata fungsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:420) diartikan sebagai “jabatan (pekerjaan) yang dilakukan”.

Menurut Moekijat yang di kutip Laman Psychologymania (2017:1), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Pemberdayaan/Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam yang dikutip Zubaedi (2013:4) “Pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu”. Sedangkan menurut Twelvetrees yang dikutip Edi Suharto (2014:38) “Pengembangan masyarakat adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama”.

Manajemen Pemberdayaan/Pengembangan Masyarakat

Menurut Zubaedi (2013:37-40) Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan community-based management (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan”.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan batasan konsep yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2005 : 90) menjelaskan bahwa “Definisi konsepsional merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak mengacu pada ide-ide atau konsep lain yang bisa saja abstrak untuk menjelaskan konsep tersebut”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah: “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adalah : Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga tingkat menengah dalam pemberian pelayanan teknis manajemen kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang berdasarkan pada peraturan untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada latar belakang dan tema pemikiran penelitian ini, maka peneliti menetapkan jenis penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Pemilihan tersebut didasarkan pada pandangan Salam (2011:71) bahwa ‘Penelitian kualitatif memiliki prinsip-prinsip teoritik dan metodologik yang unik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan holistik serta pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna (meaning) “di balik” suatu fenomena sosial”.

Fokus penelitian bertujuan mengetahui kriteria-kriteria atau masukan-masukan yang memberikan informasi di lapangan. Melalui bimbingan atau arahan fokus penelitian dapat mengetahui secara pasti data mana yang diperlukan dan dikumpulkan dan data mana yang dihilangkan karena dianggap tidak relevan. Oleh sebab itu, fokus penelitian sangat berkaitan dengan rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini memadukan berbagai sumber data dengan menggolongkan kepada 2 (dua) sumber data utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sehingga sumber data dalam penelitian ini yakni:

(1) Data primer

Menurut Sugiyono (2016: 62) adalah “Sumber data yang *langsung memberikan data* kepada pengumpul data”. Sehingga dalam hal ini data primer berupa “kata-kata, dan tindakan” sebagaimana menurut Lofland dan Lofland yang dikutip Lexy J Moleong (2010: 157) atau bukan “Berupa angka hitung-hitungan” sebagaimana pendapat Raco (2010:108) diatas.

(2) Data sekunder

Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2016: 62) adalah “Sumber yang *tidak langsung memberikan data* kepada pengumpul data, misalnya lewat ornag lain atau lewat dokumen”, serta sejumlah data

pendukung seperti berupa “berbentuk teks, foto, cerita, dan gambar” sebagaimana yang dijelaskan Raco (2010:108) diatas.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, peneliti dalam pengumpulan data menggunakan 4 (empat) macam teknik pengumpulan data sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:63-85) dimana secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan, meliputi:
2. Wawancara.
3. Dokumentasi.

Gabungan/triangulasi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang dikutip Sugiyono (2016:91) bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (dalam arti memenuhi dan mencapai tujuan penelitian)”.

Keempat tahapan tersebut sebagaimana di uraikan oleh Sugiyono (2016:92-99) meliputi:

1. Data collection (pengumpulan data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga harus segera dilakukan reduksi data.
2. Data reduction. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Data display (penyajian data). Setelah data direduksi, kemudian data disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Conclusions: drawing/verifying. Langkah terakhir analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Loa Janan Iilir adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Loa Janan Iilir merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Seberang pada tanggal 28 Desember 2010. Loa Janan Iilir merupakan pintu gerbang menuju Kota Samarinda dari arah Balikpapan. Sebelumnya, Loa Janan Iilir adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang. Pada tahun 2006, Loa Janan Iilir dimekarkan menjadi tiga kelurahan, yakni Sengkotek, Simpang Tiga, dan Tani Aman sehingga secara administratif, nama kelurahan Loa Janan Iilir tidak ada lagi. Kemudian nama Loa Janan Iilir diusulkan untuk dipakai kembali, bukan sebagai kelurahan baru, melainkan sebagai kecamatan baru dan 3 kecamatan pemekaran lainnya. Kelurahan Simpang Tiga merupakan kelurahan tertua dan terpadat populasi di wilayah Kecamatan Loa Janan Iilir. Atas dasar pemekaran tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Perda Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11 (sebelas) Kelurahan Baru. Hasil dari pemecahan pemekaran dalam wilayah Kota Samarinda, melakukan pemekaran wilayah dibeberapa kelurahan yang dinilai memenuhi syarat, termasuk Kelurahan Simpang Tiga.

Melaksanakan Pengumpulan dan Penyiapan Data pada Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sudah baik. Karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kesejahteraan sudah cukup efektif dan efisien dan dibantu dengan para kader PKK dan tokoh masyarakat serta sudah sesuai dengan peraturannya.

Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil wawancara di atas, kesimpulannya Kepala Seksi Kesejahteraan dalam perumusan kebijakan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan aturan dan berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam perumusan kebijakan itu dirancang atau dibuat dengan ketelitian dan pertimbangan serta persetujuan dari Lurah.

Koordinasi, Komunikasi, Perencanaan dan Pelaporan di Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan koordinasi, komunikasi, perencanaan dan pelaporan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Kepala Seksi Kesejahteraan sudah cukup baik, baik bersama staf maupun masyarakat dan sesuai dengan aturan dan arahan dari Lurah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Jadi dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor yang pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adalah dari kerjasama yang sering dilakukan kelurahan dan masyarakat dalam melakukan kegiatan baik dalam komunikasi dan koordinasi bagi kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan dalam faktor penghambatnya sendiri kurangnya anggaran dan sumber daya manusia.

Pembahasan

Melaksanakan Pengumpulan dan Penyiapan pada Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Suatu organisasi dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan harus memelukan data yang akurat, bila diproses akan menghasilkan informasi yang juga akurat. Informasi akurat sangat berguna untuk membuat keputusan, baik bagi manajemen maupun orang lain. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membuat keputusan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala kasi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir. Pengumpulan dan penyiapan data yang di lakukan tidak hanya Kepala Seksi namun dibantu oleh kader-kader PKK dan masyarakat serta tim keluarahn yang ditunjuk.

Pengumpulan dan penyiapan sebagai bentuk tugas dari Kepala Seksi Kesejahteraan di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir sudah dilakukan secara baik. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dilakukan berdasarkan pada aturan Peraturan Daerah Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda yaitu tentang pengumpulan dan penyiapan data untuk membuat suatu rumusan kebijakan yang diperutukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga. Pengumpulan dan penyiapan semua data yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dilakukan secara rutin dan teliti sehingga data yang dibutuhkan dapat digunakan sebagai pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Kemampuan dan pemahaman yang memadai dari perumusan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya

Melalui perumusan kebijakan bidang kesejahteraan dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai bentuk tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yang melaksanakan pemerintahan di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir Kota Samarinda sudah dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta aspirasi masyarakat dan pembuatan perumusan kebijakan dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Pembuatan perumusan kebijakan sebagai sebuah proses akan meliputi sejumlah proses, aktivitas, dan keterlibatan pimpinan. Masyarakat dan bidang yang terkait. Hasil perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan beserta tim dapat digunakan sebagai pembentukan kebijakan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir.

Koordinasi, Perencanaan dan Pelaporan Dibidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang hendak dicapai, strategi yang hendak dijalankan, keputusan yang harus dilaksanakan, rencana yang harus direalisasikan, program kerja yang harus diselenggarakan, kegiatan yang harus dilaksanakan, semuanya memerlukan hubungan, baik antar individu maupun antar satuan kerja. Dengan kata lain, para anggota organisasi mutlak perlu berkomunikasi, berkoordinasi satu sama lain. Dengan demikian bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan bagian integral daripada seluruh proses manajemen. Dengan demikian, jelas bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang amat penting untuk mendapat perhatian dari seluruh anggota organisasi tidak halnya dengan Kepala Seksi Kesejahteraan, baik tingkat pelaksana, apalagi tingkat pimpinan. Melalui komunikasi yang efektiflah kerjasama yang harmonis dan intim dapat ditumbuhkan, dipelihara dan dikembangkan. Dengan kata lain bahwa tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik dan efektif, tujuan organisasi tidak akan mungkin tercapai.

Tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang Kesejahteraan dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, koordinasi sudah dilakukan dengan baik, sehingga semua perumusan kebijakan

yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang pengembangan /pemberdayaan masyarakat benyampai laporan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan baik dengan Lurah sebagai kepala pemerintahan di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir namun juga pelaporan kepada masyarakat secara transparan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Kesejahteraan sosial suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal Balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap Perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam perbaikan masalah ekonomi dan soslal masyarakat merupakan tugas kita bersama, Pemerintah Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir telah melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik didukung faktor kerjasama dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan.

Salah satu kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama seperti yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dengan pimpinan, bagian yang terkait, kader-kader PKK dan masyarakat serta setiap yang tergabung dalam tim. Untuk faktor penghambat tugas dan fungsi Kepala seksi Kesejahteraan adalah keterkendalanya agara dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rumuskan atau direncanakan serta sumber daya manusia yang kurang, baik kualitas maupun kuantitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Simpang Tiga mengenai studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, dilihat dari segi:
 - a) Melaksanakan Pengumpulan dan penyiapan data dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik

- dan sesuai dengan aturan serta dibantu dengan kader PKK dan tokoh masyarakat.
- b) Setiap perumusan kebijakan yang dilaksanakan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik. Perumusan kebijakan berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, arahan dan aspirasi masyarakat.
 - c) Koordinasi, komunikasi, perencanaan dan pelaporan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik sehingga semua kegiatan terlaksana.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan adalah kerjasama yang dilakukan oleh semua jajaran yang ada di Pemerintah Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir dan masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah anggaran yang terbatas, SDM yang kurang baik kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan.

Saran

Adapun saran dalam studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi kesejahteraan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yaitu dapat dilihat dari 3 segi:

1. Dalam Pengumpulan dan penyiapan data dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sebaiknya semua data diperiksa secara rutin dan teliti sehingga data yang dibutuhkan dapat digunakan sebagai pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir Kota Samarinda sehingga perencanaan yang ditetapkan bisa terlaksana lebih efektif dan efisien.
2. Perumusan kebijakan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sebaiknya dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, itu bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Jadi diperlukan musrembang dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Koordinasi, komunikasi, perencanaan dan pelaporan Kepala Seksi Kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat hendaknya lebih berkomunikasi dan berkoordinasi kesegala pihak baik interen maupun eksteren sehingga untuk menunjang kegiatan baik dalam anggaran maupun sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. PT. Alfabeta: Bandung.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2001. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara

- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika: Jakarta.
- Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- _____. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. Teori, Perilaku, Budaya Organisasi. Refika Aditama: Bandung
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Manullang, M. 2007. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- _____. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. GP Press Group: Jakarta.
- Raco, Jozep Richard. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Salam, Muslim. 2011. Metode Penelitian Sosial: Kualitatif Menggugat Doktrin Kuantitatif. Masagena Press: Makassar.
- Soeharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). CV. Alfabeta: Bandung.